

**LINGKUNGAN BINAAN YANG TERBENTUK
OLEH USAHA SURVIVAL MASYARAKAT MARJINAL
DARI KRISIS EKONOMI KE KRISIS PERKOTAAN**

Kasus studi: Kota Bandung

Yasmin S, Alexander Sastrawan dan Tito G. Wiguno*)

ABSTRACT

This study explores the urban problems that generated by street retailers. Like other big cities, in Bandung, one of the Indonesian big cities, there are more or less 32.000 street retailers. Some of them used their small kiosk as living space. They occupied illegally almost the whole of pedestrian paths, open spaces, green belts, and other urban spaces. Bandungis like the great market place now, because almost all part of the city became a big market place.

Using cross-tabulation and descriptive analysis of observed 407 samples, this study finds some unique phenomena of the changes of street retailer's existence, which significant to be considered carefully by urban planner, urban designer and urban manager.

Recently, the existence of street retailers almost in the whole urban areas became stronger. There are four phases of the street retailer's existence in Bandung that manifested on their living space in urban area.

First, the street retailer's kiosks as an alternatif living space on survival phase of marginal society on their effort out of the economic-crisis. The second, transcendence process of change, from 'survival-phase' to 'hidden power phase'. Third, escalation process of change, from 'non-permanent of living space' to

*) Ketiga penulis adalah dosen Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur

'permanent of living space'. Fourth, immanent process from 'economic crisis' to 'built environmental crisis'.

I. Pendahuluan

Sejarah menunjukkan bahwa krisis demi krisis dialami oleh kelompok masyarakat marjinal. Baik krisis karena kondisi ekonomi, keamanan/keselamatan, maupun bencana.

Usaha dalam mengatasi atau untuk keluar dari suatu krisis tersebut antara lain ada yang berpengaruh terhadap lingkungan binaan.

Usaha yang biasa dilakukan dalam mengatasi krisis pada suatu tempat antara lain: pindah dari desa ke kota, tinggal di pinggiran mencari nafkah di kota dengan *shelter* seadanya, ulang-alik (tinggal di hinterland, bekerja di pusat kota).

Dari sekian usaha tersebut ada bentuk usaha *survive* yang telah dikenal atau dilakukan sejak dahulu, yaitu 'kios rokok sebagai tempat tinggal' atau menjalankan usaha berjualan dalam skala kecil ('ketengan') yang menempati *space* di pinggir jalan (biasa di sebut pedagang kaki lima) yang sifatnya 'mendekati permanen' dalam bentuk kios yang sekaligus sebagai tempat tinggal (baik sementara, maupun 'mendekati menetap').

Sebelum krisis, hal itu dilakukan dengan sikap 'terbatas' karena rasa takut & rasa salah, karena ilegal, atau karena adanya tindakan dari aparat. Tetapi di masa setelah krisis ekonomi yang kita alami dalam beberapa tahun terakhir ini, hal itu menjadi sangat fenomenal, menjadi makin merebak. Sikap terbatas tadi telah diterobos. Tidak ada lagi rasa takut, rasa salah, dan aparatpun enggan menertibkan karena khawatir muncul krisis sosial yang sesaat namun dampaknya dapat menghancurkan kehidupan kota. Seperti pengalaman yang ditunjukkan oleh sejarah, sejalan dengan perjalanan waktu, sifat krisis tersebut akan menjadi power sehingga akan sulit ditangani, yaitu ketika power itu sudah berakar kuat dan akan menimbulkan krisis lain di masa mendatang, sehingga lebih sulit untuk dibenahi lagi. (contoh : kejadian di Cimol, di Bandung).

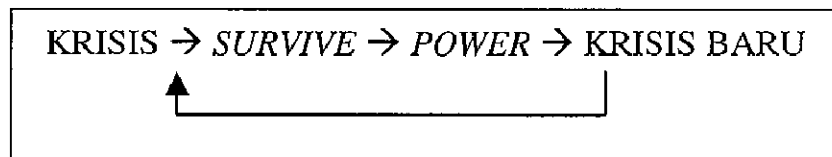
Bila hal itu terus berlangsung, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah yang lebih parah di masa datang.

Walaupun selain hal negatif, terdapat pula hal positif yang dapat ditarik dari cara *survive* mereka tersebut, antara lain:

- Dapat menjadi preseden bagi masyarakat marjinal lainnya untuk bangkit dari krisis
- Untuk selanjutnya menjadi budaya untuk *survive* para masyarakat marjinal
- Dapat menjadi *power/investasi* masa depan keluarga mereka

Banyak usaha untuk menertibkan keadaan itu, dengan berbagai implikasi negatif dan positif. Hasil negatifnya lebih sering terkuak seperti yang banyak ditemui pada pemberitaan di media massa. Sedangkan hasil positifnya dapat dikatakan dapat dihitung dengan jari misalnya usaha pembenahan yang menyangkut pula dari aspek arsitektural: Proyek Citra Niaga di Samarinda, Pusat Penjualan Cikapundung Elektronik di Bandung. Untuk dapat membenahi yang sudah berlangsung dan mengantisipasi kemungkinan dimasa datang yang berkaitan dengan okupasi masyarakat marginal pada vacant-land ini perlu pemahaman tentang profil masyarakat yang dimaksud, beserta tipo-morfologi arsitektural lingkungan binaan yang terbentuk karena kegiatan mereka. Masyarakat marjinal yang dimaksud adalah masyarakat yang mempunyai kegiatan membuka usaha berupa kios atau tempat berjualan pada vacant land di kota, yang sering dikenal sebagai pedagang kaki lima. Pemanfaatan lahan kosong (vacant land), biasanya terjadi di sisi sepanjang jalan yang dilewati mobil dan orang, yang frekuensi dilewatinya sangat tinggi. Pemahaman selama ini tentang kegiatan pedagang kaki lima tersebut adalah sebagai salah satu cara masyarakat marjinal tersebut untuk bertahan hidup dalam menghadapi krisis ekonomi, untuk selanjutnya keluar dari krisis tersebut. Kegiatan usaha tersebut mengambil atau memakai tempat pada ruang kota, yang kebanyakan berupa bagian dari ruang jalan dan bagian ruang kota lainnya yang mereka anggap strategis untuk usahanya. Kegiatan tersebut membentuk wujud lingkungan binaan yang spesifik, yang tipologi-

morfologinya mempunyai rentang dari wujud berupa shelter non permanen seadanya sebagai tempat survival sampai dengan wujud yang relatif permanen berupa space of living dengan muatan power untuk bertahan menguasai space/lahan tersebut. Dampak adanya power yang mereka miliki tersebut lebih jauh adalah pada kualitas lingkungan binaan dalam hal ini pada ruang jalan atau ruang kota, karena dalam pembentukan wujud fisik tempat usahanya dilakukan relatif sekedarnya dan dengan usaha pemeliharaan yang sekedarnya pula. Hal itu akan merupakan krisis baru di masa mendatang, yaitu krisis lingkungan binaan di perkotaan.



Tujuan penelitian ini adalah untuk dapat menjelaskan bagaimana lingkungan binaan yang terbentuk di perkotaan yang ditimbulkan oleh salah satu kegiatan atau usaha survival masyarakat marjinal yaitu pedagang kaki lima, melalui :

1. Identifikasi tentang seberapa besar potensi masyarakat marjinal untuk bertahan dan menanamkan power untuk menguasai *space/lahan*.
2. Identifikasi tentang dampak positif dan negatifnya okupasi *space/lahan* oleh masyarakat marjinal tersebut terhadap lingkungan binaan di perkotaan.

Hal itu berguna untuk mengantisipasi tentang seberapa besar peluang untuk membenahi dampak negatif dan memanfaatkan hal positif pada lingkungan binaan yang berkaitan dengan adanya okupasi atau power terhadap penguasaan *space/lahan* tersebut.

Survai dilakukan pada '*shelter*' berupa kios di kaki lima di sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lingkungan/lokal). Mencakup profil pemakai/penggunanya (pedagang kaki lima) dan wujud fisik ruang jalan atau ruang kota yang terbentuk oleh kegiatan pedagang kaki lima tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di kota Bandung. Survai dilakukan pada waktu kegiatan pagi, siang, sore dan malam.

.Kuesionair dan wawancara terstruktur diarahkan untuk mendapatkan temuan tentang profil pedagang kaki lima yang menempati *vacant land* kota, mencakup profil sosial-ekonomi dan latar belakang keberadaan mereka di lingkungan tersebut, kesanggupan, kemampuan dan kemauan mereka untuk tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan binaan. Untuk itu ditentukan 15 (lima belas) variabel yang berkaitan dengan profil pedagang kaki lima dan kegiatannya, dan 12 (dua belas) variabel yang berkaitan dengan wujud fisik ruang jalan atau ruang kota lainnya yang terbentuk oleh kegiatan pedagang kaki lima tersebut.

II. Profil Sosial-Ekonomi Masyarakat Marginal dan Usaha Survival Untuk Keluar dari Krisis Ekonomi

Bagian tulisan ini merupakan penjelasan temuan penelitian yang akan diuraikan per variabel, dan dicoba untuk mengelompokkannya kepada kategori tahapan tingkat survive, yaitu : tahap keluar dari krisis, tahap pembentukan hidden power, sampai dengan tahap munculnya potensi krisis baru (krisis perkotaan).

A. Usaha pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu alternatif wadah survival untuk keluar dari krisis ekonomi.

1. Tahun mulai usaha PKL

PKL yang mulai berusaha sejak tahun 1949, ditemukan hanya satu, kemudian secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya usaha PKL makin banyak jumlahnya. Puncaknya adalah pada rentang tahun 1991 sampai dengan tahun 2000.

Dapat dikaitkan hal ini dengan kondisi krisis ekonomi di Indonesia dan semakin tertujunya alternatif berusaha sebagai PKL. Hal itu menunjukkan bertambah kuatnya eksistensi usaha sebagai PKL. Hal tersebut terlihat dari usaha sebagai PKL dari tahun ke tahun makin bertambah dan makin diminati.

2. Asal PKL

Asal PKL terbanyak adalah dari Jawa Barat (selain Bandung). PKL berasal dari Bandung sendiri menempati urutan kedua banyaknya. Figur tersebut dapat memberikan gambaran bahwa kota Bandung adalah sebagai tempat tujuan dari penduduk *hinterlandnya*. Selebihnya adalah dari Jawa Tengah, Jawa Timur dan luar Jawa. Jumlah PKL yang berasal dari luar Jawa merupakan urutan ketiga. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bandung sebagai kota tujuan pula di Jawa selain Jakarta untuk mencoba mengadu nasib. Tempat tinggal PKL di Bandung yang berasal dari Bandung, rata-rata berada relatif di pinggir kota, dan berusaha sebagai PKL menempati lokasi yang tidak jauh dengan tempat tinggalnya.

3. Rentang pendapatan

Rentang pendapatan PKL menunjukkan hal cukup mengejutkan. Rentang tertinggi adalah pada rentang antara > 2 juta sampai dengan 5 juta. Rentang pendapatan sampai dengan 500 ribu rupiah memang menempati urutan kedua kemudian disusul berangsur untuk urutan lebih besar dari 500 ribu dan seterusnya. Pendapatan seperti itu lebih besar dari UMR di Jawa Barat (sekitar 375 sd 400 ribu rupiah). Lebih mengejutkan lagi, terdapat 19 PKL, atau 4,7 % yang masuk dalam rentang pendapatan diatas 10 juta perbulan. Jauh diatas rata-rata pendapatan di sektor formal masyarakat Indonesia.

4. Rentang pengeluaran

Urutan rentang pengeluaran PKL, menunjukkan hal yang menggembarakan, mengingat rentang pengeluaran yang terbanyak frekuensinya adalah pada rentang terbawah (rentang sampai dengan 500 ribu) sebanyak 122 PKL, kelompok tersebut lebih sedikit daripada jumlah PKL yang mempunyai pendapatan pada rentang sampai dengan 1 juta rupiah (168 PKL). Lebih jauh dapat dilihat pada tabel tabulasi silang

antara rentang pengeluaran dan rentang pendapatan. Pada rentang pengeluaran teratas terdapat hanya 8 PKL yang pengeluarannya berada pada rentang yang sama, dengan kata lain pengeluaran 10 PKL lainnya berada pada rentang pengeluaran yang jauh dibawah rentang pendapatannya.

Dapat ditarik kesimpulan dari figur diatas bahwa usaha PKL diyakini dapat mengangkat tingkat kehidupan dari sekedar mengadu nasib, melalui krisis, dan bertahan hidup, sampai dengan tingkat menjanjikan bagi masa depan mereka. Atau dengan kata lain terdapat potensi *saving* dari usaha sebagai pedagang kaki lima, dan usaha sebagai pedagang kaki lima sudah dapat dikatakan menjadi satu bidang kerja tersendiri.

5. Rentang biaya pemeliharaan

Pada rentang biaya pemeliharaan kios atau tempat usaha kebanyakan dilakukan tanpa biaya pemeliharaan. Hanya satu PKL yang mengeluarkan biaya pemeliharaan per tahunnya mencapai 1 juta rupiah dan satu PKL yang mengeluarkan biaya pemeliharaan lebih dari 1 juta rupiah. Keduanya mempunyai pendapatan pada rentang 2 sampai dengan 5 juta rupiah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha PKL, merupakan usaha yang '*maintenance free*' atau paling tidak merupakan usaha dengan biaya pemeliharaan yang rendah, sehingga hal itu menambah kemudahan mereka untuk lebih cepat keluar dari rentang pendapatan yang rendah. Terlepas dari apakah hal tersebut positif atau negatif dari sudut pandang lain. Misalnya dari sudut kebersihan lingkungan yang akan dibahas pada bagian lain dari tulisan ini.

B. Menguatnya eksistensi pedagang kaki lima.

1. Rencana menetap di lokasi ini

PKL yang ingin menetap di lokasi yang mereka tempati saat ini sangat signifikan jumlahnya yaitu 74,4 % dibanding dengan yang tidak ingin menetap pada lokasi yang ditempati sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kadar kesulitan di masa mendatang bila akan dilakukan penertiban, pengaturan, dan penataan terhadap PKL tersebut.

4. Rencana pindah dari lokasi ini

Sebagai periksa silang, pada pertanyaan apakah para PKL tersebut mempunyai rencana untuk pindah dari lokasi yang ditempati saat ini, 74,4 % PKL menyatakan tidak mempunyai rencana dan keinginan untuk pindah dari tempat yang digunakan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa hasrat untuk menguasai tempat, dalam hal ini ruang kota, sangat kuat sekali.

5. Bila pindah dari lokasi ini akan berusaha sebagai PKL lagi

PKL, baik yang ingin menetap maupun yang ingin pindah dari lokasi sekarang, menginginkan akan menjadi PKL lagi, lebih banyak daripada yang ingin pindah usaha, yaitu 11,8 % berbanding 5,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa paradigma tentang usaha sebagai PKL makin berubah. Dengan kata lain usaha sebagai PKL semakin diminati.

6. Penyimpanan barang se usai berjualan

Sebanyak 51,1 % dari PKL yang disurvei meninggalkan barang mereka di tempat mereka berjualan, 42,8 % PKL membawa pulang barang jualan mereka se usai waktu berdagang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, PKL telah menggantungkan dirinya cukup kuat dengan tempat atau ruang kota dimana mereka berjualan. Hal itu memperkuat dugaan akan besarnya hasrat untuk berakar pada tempat tersebut, dan memperkuat keberadaannya pada lokasi tersebut. Dengan demikian berangsur, sifat

non-permanen PKL cenderung berubah menjadi permanen. Lebih jauh hal ini perlu dicermati secara hati-hati terutama dampaknya nanti terhadap lingkungan di ruang jalan atau ruang kota secara keseluruhan.

7. Ada tidaknya pergantian tempat PKL (10)

Sebanyak 82,8 % dari PKL yang disurvei menyatakan tidak ada PKL yang menempati tempatnya sebagai PKL pengganti sesuai waktu dagangnya. Hal ini menunjukkan kekuatan eksistensinya dalam menguasai ruang kota.

Ada hal yang menarik pada PKL yang menyatakan bahwa ada PKL pengganti setelah mereka selesai berjualan, yaitu sebanyak 12,3 %. Hal ini menunjukkan hal intensifikasi ruang dan sistem berpencaharian. Intensifikasi ruang ternyata telah dilakukan oleh sebagian kecil PKL, menggunakan tempat yang sama secara bergiliran. Dari wawancara terungkap bahwa jadwal giliran berdagang tergantung pada kesepakatan dan tergantung pada sistem berpencaharian. Sistem berpencaharian yang dimaksud, ada yang melakukan pergantian pagi dan malam, tetapi ada juga yang waktu pergantiannya dalam rentang waktu per satu bulan sampai dengan tiga bulan. Selama satu sampai tiga bulan mereka berdagang sebagai PKL di kota, penghasilan yang mereka dapat akan cukup untuk hidup di desa dan bertani atau berkebun selama satu sampai tiga bulan pula. Demikian pula bagi PKL penggantinya tersebut. Dengan demikian makin nyata bahwa usaha PKL adalah salah satu usaha dimana masyarakat marjinal dari *hinterland* mengadu nasib di kota, dan ternyata membawa hasil sehingga telah membentuk pola kerja PKL musiman tersebut.

C. Keluar dari krisis ekonomi & hidden power

1. Usaha PKL sudah/belum mencukupi kebutuhan hidup

Dari 407 PKL yang dijadikan *sample*, sebanyak 294 PKL atau sebanyak 72,2 % menyatakan bahwa usaha PKL sudah mencukupi untuk kebutuhan hidup. Angka tersebut sangat signifikan menunjukkan bahwa usaha PKL bukan semata-mata untuk bertahan hidup lagi tetapi sudah mencukupi untuk kehidupan yang layak. Dengan demikian pengertian dan konsep tentang masyarakat marjinal sebagai label untuk pedagang kaki lima perlu didefinisikan kembali.

2. Bila usaha PKL sudah mencukupi kebutuhan hidup

Lebih jauh lagi sebanyak 166 PKL yang merasa telah cukup dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, menyatakan ingin menetap di tempat sekarang. Hal ini menunjukkan kemapanan yang dirasakan oleh mereka. Sebanyak 68 PKL menyatakan ingin buka cabang yang serupa di lokasi lain. Ini berarti usaha PKL memang cukup diminati. Namun demikian terdapat 9,1 % PKL yang menginginkan ganti usaha, karena merasa sudah cukup modal.

3. Bila usaha PKL belum mencukupi kebutuhan hidup

Dari 82 PKL yang memberikan jawaban atas pertanyaan, bila usaha PKL tersebut belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka 21 PKL menyatakan akan ganti usaha lain tetapi, menempati tempat yang sama dengan yang digunakan sekarang.

Sebanyak 52 dari 82 yang memberikan jawaban akan tetap berusaha sebagai PKL dan tetap pada tempat yang ada sekarang. Hanya 9 dari 82 yang menyatakan akan pindah tempat, dengan usaha tetap sebagai PKL.

Dapat disimpulkan bahwa usaha PKL sangat menjanjikan bagi masa depan mereka. Tempat yang dikuasai mereka saat ini merupakan aset yang sangat ingin dipertahankan.

4. Perlakuan terhadap tempat usaha, bila pindah tempat usaha.

Sebanyak 52,1 % PKL akan membawa dan membongkar tempat dagang mereka, bila mereka pindah tempat. Hal itu berarti tempat dagang mereka merupakan hal yang berharga bagi mereka. Itu menunjukkan bahwa usaha PKL bukanlah usaha yang tidak dijalani dengan serius, paling tidak dalam pengadaaan tempat dagang, walaupun sekilas tampak dibuat seadanya. Dengan demikian kemungkinan kecenderungan untuk menjadi permanen bertambah kuat. Lebih jauh, hal ini berkaitan pula dengan pengaruhnya terhadap lingkungan fisik binaan. Makin tinggi kecenderungan untuk menjadi permanen makin tinggi pula kadar kecenderungan membebani kapasitas ruang pada lingkungan binaan.

8. Jaminan untuk dapat terus berjualan disini (15)

Sebanyak 65,1 % PKL menyatakan bahwa mereka mempunyai jaminan untuk dapat terus berjualan di tempat yang mereka tempati sekarang, karena telah membayar retribusi/iuran keamanan dan kebersihan, 4,4 % menyatakan mengantongi ijin berjualan. Sebanyak 22,1 % yang menyatakan bahwa tidak ada jaminan untuk dapat terus berjualan di tempat yang mereka gunakan sekarang.

Dapat ditarik kesimpulan dari kondisi tersebut, bahwa terdapat aturan tidak tertulis yang dianut oleh sebagian besar PKL bahwa dengan membayar retribusi dan iuran keamanan/kebersihan adalah cukup bagi mereka untuk merasa dapat menguasai tempat yang mereka gunakan untuk berusaha. Memang, di Bandung ada SK Walikota yang mengatur tentang ruang jalan mana saja di kota Bandung yang dapat digunakan untuk PKL. Namun perlu dicermati lebih dalam apakah yang diatur dalam

SK tersebut sesuai dengan realisasi di lapangan. Ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Sekilas, ada beberapa yang tidak sesuai. Antara lain, berjualan di badan jalan, tidak mengindahkan kebersihan dan ketertiban umum.

III. Wujud Lingkungan Binaan yang Terbentuk oleh Adanya Usaha Survival Masyarakat Marginal untuk Keluar dari Krisis

A. Pemanfaatan ruang jalan/ruang kota

1. Okupasi ruang jalan/ruang kota sebagai *living space* (16)

Dari 407 PKL yang disurvei, terdapat 338 PKL atau sebanyak 83 % tidak menghuni kios atau tempat berjualannya, dan 66 PKL atau 16,2 % menjadikan tempat berjualannya sekaligus sebagai huniannya. Bertambahnya tempat jualan yang dihuni dari tahun ke tahun merupakan indikasi bahwa eksistensi PKL makin kuat dalam menguasai lahan atau ruang kota. Walaupun pada awalnya adalah sebagai wadah menampung PKL yang kebanyakan berasal dari *hinterland* Bandung, yang mencoba keluar dari krisis ekonomi. Kecenderungan yang cukup fenomenal, dari non-permanen ke permanen, lebih jauh hal ini dapat dikaji melalui bentuk kios yang akan dikaji pada bagian lain dari tulisan ini.

2. Rentang waktu berusaha di tempat ini (17)

Walaupun tidak dapat ditarik garis yang tegas sekali, pola waktu berusaha PKL dapat dibagi dalam tiga kategori, pagi-sore, sore-malam, dan pagi-malam. PKL yang berjualan pada waktu pagi sampai sore sebanyak 55,8 %, sore-malam sebanyak 18,2 %, dan pagi-malam 26 %. Segi positif terhadap kota adalah, bahwa kota hidup hampir sepanjang 24 jam, walaupun itu hanya pada bagian tertentu kota saja. Jumlah 26 % dan 55,8 % adalah cukup signifikan sebagai indikator penguasaan ruang kota

selama sehari penuh dan hampir 24 jam. Lebih jauh, tuntutan berjualan dari pagi hingga malam, cenderung menuntut penguasaan ruang yang makin bergeser ke arah permanen.

Sejauh hal itu tidak membawa dampak yang besar terhadap lingkungan fisik binaan (kota), maka kegiatan tersebut tentu saja banyak membawa dampak positif (antara lain kehidupan kota 24 jam seperti yang disebutkan diatas). Tetapi ketika dampak negatif sudah mulai muncul, maka ancaman terhadap krisis lingkungan binaan perlu diantisipasi sejak dini.

B. Dampak terhadap ruang jalan/ruang kota

1. Ruang jalan/ruang kota yang digunakan

Ruang jalan atau ruang kota yang digunakan PKL sangat beragam. Terbanyak (55 %) menggunakan trotoir, sesuai dengan label PKL, pedagang yang menempati ruang selebar lima kaki. Label tersebut sudah mulai kabur, karena PKL tidak hanya menempati trotoir saja, tetapi juga menempati badan jalan sebanyak 11,8 %, menyusul kemudian berm tanah 11,3 %, kombinasi trotoir dan badan jalan sebanyak 5,9 %, dan berm rumput sebanyak 3,9 %. Selebihnya PKL menempati kombinasi trotoir dengan berm rumput, bagian pekarangan, lahan sisa, bagian taman, beranda pertokoan, dan beberapa kombinasi tempat tersebut.

Semua tempat tersebut sebenarnya mempunyai fungsi masing-masing. Trotoir adalah untuk pedestrian atau tempat pejalan kaki melintas, badan jalan merupakan bagian jalan untuk lalu lintas kendaraan, berm rumput jelas sebagai jalur hijau di pinggir jalan, berm tanah, biasanya merupakan lahan dipinggir jalan yang belum diperkeras sebagai trotoir, atau yang seharusnya berupa berm rumput tanpa rumput, karena selalu terinjak dan selalu dilintasi baik oleh pejalan kaki, maupun oleh kendaraan.

Ruang kota atau bagian ruang jalan tersebut, tampaknya sudah sangat menjadi kelaziman bagi PKL, digunakan sebagai tempat berdagang/berusaha. Tidak itu saja, bahkan bagian dari taman kota pun, serta beranda pertokoan tidak luput dari kegiatan “penguasaan ruang kota” oleh PKL. Di pusat kota, badan jalan penuh dengan PKL, sehingga jalur kendaraan hanya cukup untuk satu jalur saja. Trotoir sudah berubah menjadi bagian dari labirin pula, sehingga pejalan kaki yang melintasinya harus siap untuk berjalan miring.

Keadaan tersebut, bila dilihat dari sudut pandang kenyamanan publik dalam beraktivitas di kota, tentu saja dapat dikatakan kurang baik, karena kenyamanan aktivitas publik di kota paling dasar dan paling besar jumlahnya untuk pergerakan (mobilitas) adalah berjalan kaki. Walaupun perimbangan kepentingan publik (umum) dan kepentingan privat (individu) tersebut harus dikaji lebih jauh, terutama mengingat persepsi yang berbeda dari berbagai pihak tentang perimbangan kepentingan tersebut.

2. Posisi penempatan wadah berusaha

Posisi berdagang merupakan kajian yang melengkapi kajian tentang ruang jalan/ruang kota yang digunakan atau ditempati oleh PKL. Inipun sangat beragam. Sebanyak 143 PKL menempati ruang kota bersifat *free standing*. Disusul kemudian pada urutan kedua adalah PKL yang memanfaatkan pagar/dinding –yang biasanya berada di belakangnya, untuk ditempel dengan tempat usaha/dagangnya, yaitu sebanyak 24,8 %. PKL yang mendudukkan wadah usahanya diatas selokan, biasanya dengan menutup bagian atas selokan tersebut dengan hamparan kayu, bambu, besi atau kombinasi bahan tersebut sebanyak 20 PKL atau sebanyak 4,9 %. PKL yang sekaligus menutupi selokan dan juga menempel pada pagar/dinding di belakangnya adalah sejumlah 19,7 %. Selebihnya para

PKL ada yang menempati badan jalan yang biasanya bercampur dengan tempat parkir kendaraan bermotor, menempati tempat teduh di bawah pohon, pada jalan masuk ke pekarangan/bangunan milik orang lain, dekat sungai, dekat muara perumahan dan berbagai kombinasi posisi.

Selokan dan sungai yang ditempati atau yang berada dekat tempat usaha, biasanya digunakan sebagai “sungai kecil” yang sering mereka perlakukan seperti sungai di wilayah dimana proses daur ulang alami masih mampu disediakan oleh sungai itu. Tidak demikian dengan selokan di perkotaan, dimana kondisi awalnya memang kadang-kadang memprihatinkan. Ditambah lagi dengan perlakuan yang kurang sesuai oleh warga kota antara lain oleh PKL, maka dapat diprediksikan kondisi saluran di perkotaan akan menghadapi masalah besar di masa depan yang benar-benar memerlukan antisipasi yang seksama. Limbah usaha PKL yang dibuang begitu saja ke selokan, ditambah lagi limbah kegiatan BAB pada selokan.

3. Lebar jalan

Kategori lebar jalan yang digunakan oleh PKL dibagi berdasarkan dimensi dan jumlah jalur sirkulasi kendaraan yang dapat dilalui. PKL paling banyak menempati jalan yang lebarnya 6-9 meter, yaitu sebanyak 147 PKL atau sebesar 36,1 %. Jalan terbanyak kedua ditempati oleh PKL adalah jalan dengan lebar 12 –15 m. Dengan demikian tidak ada korelasi antara lebar jalan dengan banyaknya PKL yang menggunakan jalan tersebut. Oleh karena itu lebih jauh, dicoba dari kategori kelas jalan menurut hirarkinya.

4. Hirarki jalan

Jalan dengan hirarki 2, yaitu sebagai jalan arteri merupakan jalan paling banyak ditempati oleh PKL yaitu sebanyak 60 %, dan secara berurutan mengikuti tingkat atau hirarki fungsi jalan tersebut. Jalan

kolektor sebanyak 39,3 % dan jalan lingkungan hanya 0,7 %. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, PKL lebih memilih jalan yang lebih sibuk lalu lintasnya, dan jalan yang menghubungkan berbagai antar kegiatan.

5. Kedalaman ruang kota yang digunakan (termasuk trotoir)

Kedalaman ruang kota yang digunakan oleh PKL terbanyak adalah antara lebih dari 2 meter sampai dengan 3 meter (sebanyak 42 %). Berikutnya adalah antara lebih dari 1 meter hingga 2 meter (sebanyak 20,1%).

Ruang kota yang digunakan oleh kebanyakan PKL sebenarnya relatif sedikit, namun bila kedalaman ruang yang dipakai tersebut dibandingkan dengan lebar jalan yang ada, dan peletakan tempat dagang PKL yang berlapis-lapis, membuat jalan atau ruang kota yang lain tidak berfungsi sebagaimana yang diperuntukkan semula.

Hal tersebut dapat juga disimpulkan, bahwa paradigma tentang fungsi dan ruang jalan tampaknya sudah berubah. Dalam artian, bahwa sebagian jalan dan ruang kota lainnya dibutuhkan untuk diperuntukkan bagi kegiatan PKL.

6. Posisi ruang jalan/ruang kota yang ditempati

Posisi ruang jalan/ruang kota yang ditempati oleh PKL baik pada simpangan atau ujung jalan, maupun pada ruas jalan adalah berimbang. Yaitu 46,2 % dan 48 %. Pada awalnya ada anggapan bahwa PKL biasanya lebih memilih menempati persilangan/simpang jalan, ternyata di kota Bandung, PKL tersebut menempati hampir semua bagian *edge* jalan.

C. Potensi terbentuknya krisis baru (krisis lingkungan binaan di perkotaan)

1. Pengaruh terhadap kebersihan lingkungan

Pengaruh kegiatan PKL terhadap kebersihan lingkungan, diindikasikan dari jenis jualan yang dianggap berpotensi untuk menghasilkan sampah, atau mengotori lingkungan sekitarnya.

Jenis dagangan yang dianggap berpotensi paling tinggi untuk mencemari lingkungan adalah makanan siap santap. PKL yang menjual jenis dagangan tersebut adalah yang terbanyak didapati, yaitu sebanyak 46,7 %, dan bahan makanan sebanyak 8,1 %. Dengan kata lain lebih dari setengah dari jumlah PKL tersebut yang berpotensi untuk mengotori lingkungan.

Sebenarnya tidak akan menjadi masalah bila sebanyak apapun sampah yang dihasilkan oleh PKL tersebut, bila sampah tersebut dikelola dengan benar. Tetapi kebiasaan mengambil jalan 'gampang' cukup terlihat. Hal tersebut berkaitan pula dengan anggapan para PKL, bahwa mereka telah membayar retribusi keamanan dan kebersihan.

2. Pola pengelompokan/penyebaran

Pola pengelompokan/penyebaran PKL yang terbanyak adalah berkelompok lebih dari 5 (lima) PKL dalam lokasi yang relatif berdekatan, yaitu sebanyak 43,7 %. Disusul dengan pola kelompok kecil antara 2 (dua) sampai 5 (lima) PKL dalam lokasi yang berdekatan. Pola penyebaran yang soliter hanya sebanyak 13,5 %. Dengan demikian, kecenderungan terjadinya aglomerasi kegiatan PKL ini cukup kuat. Hal itu diduga berkaitan dengan tuntutan rasa kebersamaan sesama PKL, dalam mempertahankan '*hidden power*' mereka terhadap lahan atau ruang kota yang mereka tempati.

3. Bentuk tempat usaha/berjualan

Bentuk tempat usaha/berjualan, sangat beragam dan banyak pula kombinasinya. Bentuk yang jumlahnya cukup signifikan adalah bentuk yang berserobong dengan gerobak beroda, yaitu sebanyak 80 PKL (20,1

%) dan yang berkombinasi dengan tambahan susunan rak/meja/peti sebanyak 63 PKL (15,5 %). Disusul kemudian dalam bentuk kios berpondasi (umpak) tanpa serobong, sebanyak 80 PKL (19,7 %) , lalu bentuk susunan rak/meja/peti dengan serobong sebanyak 65 PKL (16 %). Adanya kios berpondasi dan gerobak beroda tetapi diberi pondasi yang cukup permanen menunjukkan bahwa dimana ada kesempatan untuk meningkatkan permanensi mereka, kesempatan itu diambil, tetapi dengan kondisi yang seadanya.

Bila kesempatan itu semakin banyak diambil, maka makin tinggi pula '*hidden power*' PKL dalam menguasai lahan/ruang kota tersebut terbentuk.

4. Luas kios/ruang usaha (27)

Luas kios/ruang usaha PKL yang terbanyak adalah yang berdimensi antara lebih dari 1 sampai dengan lima meter persegi, sebanyak 44 %. Menyusul luasan kios/ruang usaha yang berdimensi antara lebih dari lima sampai dengan sepuluh meter persegi, sebanyak 31 %. Hal yang perlu dicermati adalah luasan kios/ruang usaha yang berdimensi antara lebih dari 10 sampai dengan 60 m² adalah sebanyak 54 PKL, lebih banyak jumlahnya dari PKL yang menggunakan luas ruang kota yang berdimensi sampai satu meter persegi.

Bila kecenderungan luas ruang usaha ini meningkat, baik dalam dimensi maupun jumlahnya, maka hal tersebut lambat laun akan menambah beban bagi ruang jalan dan ruang kota lainnya yang terancam akan dikuasai oleh PKL.

Dapat dijadikan pertanyaan lebih lanjut, label marginal untuk pedagang kaki lima, yang dapat menguasai lahan seluas sampai dengan 60 m², pada posisi yang strategis di kota, yang mempunyai nilai lahan yang

sangat tinggi. Lebih jauh hal ini dapat ditarik ke pertanyaan tentang keadilan dalam penggunaan dan hak publik terhadap ruang publik kota.

IV. Kesimpulan dan Saran

Dari uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kios kaki lima sebagai salah satu alternatif wadah survival masyarakat marjinal keluar dari krisis ekonomi.

a. Label pedagang kaki lima sebagai salah satu kelompok masyarakat marjinal perlu dipertanyakan kembali.

Selama ini pedagang kaki lima diberi label sebagai kelompok masyarakat marjinal, sehubungan dengan anggapan sifat tidak resmi (sektor informal) dan tidak “legal”.

Sebagian pihak beranggapan bahwa masyarakat di sektor informal identik dengan kekumuhan dan kemiskinan, atau marjinal dalam pengertian ketidakcukupan, atas batas minimal kelayakan hidup, atau berada pada batas kemampuan bertahan hidup.

Seberapa benar anggapan itu, perlu dipertanyakan lebih lanjut. Pada penelitian ini terungkap bahwa marjinal dalam pengertian batas kemampuan bertahan hidup, sebagian telah dilampaui dan bahkan telah ada usaha PKL yang tidak lagi sebagai usaha transisi, namun sudah dapat menjadi gantungan hidup, bahkan jaminan kehidupan yang lebih baik dari rata-rata penghasilan di Indonesia. Hal itu terungkap dalam bahasan variabel : 1,2,3,4,5,11,12,13,27

b. Kecenderungan semakin kuatnya eksistensi PKL.

Kecenderungan semakin kuatnya eksistensi PKL terungkap pada bahasan variabel : 1,6,7,8,9,10,15,16,17,25,26,

2. Transendensi dari “survival” ke “hidden power”

Meningkatnya posisi usaha pedagang kaki lima secara vertikal berupa terangkatnya dari posisi sekedar bertahan hidup sampai pada posisi mempunyai *power* dalam hal *territorial space*. Hal itu ditunjukkan dalam bahasan variabel : 3,4,5,11,12,13.

a. Perubahan paradigma

Perubahan paradigma tentang usaha PKL terungkap dalam bahasan : 6,7,8. Dengan demikian perlu redefinisi tentang usaha PKL. PKL memang pada awalnya merupakan salah satu alternatif usaha survival, tapi kini dapat dikatakan merupakan satu bidang kerja tersendiri, yang banyak diminati.

b. Hasrat bertahan & berkembang melalui waralaba atau percabangan jaringan

Lebih jauh, usaha PKL sebagai satu bidang kerja tersendiri memacu dan memperkuat hasrat untuk bertahan pada *space* yang dikuasainya. Lebih dari itu memacu selanjutnya hasrat untuk pengembangan penguasaan terhadap *space* melalui usaha semacam waralaba atau percabangan jaringan. Hal itu terungkap dalam bahasan variabel : 6,7,8,9,10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27

3. Eskalasi dari non permanen ke permanen

Eskalasi kemampuan fisik wadah usaha PKL dari non permanen ke permanen diungkap dari fenomena pola penyebaran dan bentuk kios yang digunakan oleh PKL

a. Pola dan penyebaran

Pola penempatan dan pola penyebaran PKL menunjukkan semakin kuatnya kecenderungan terjadinya aglomerasi kegiatan PKL, semakin kuatnya rasa kebersamaan sesama PKL, dalam

mempertahankan '*hidden power*' mereka terhadap lahan atau ruang kota yang mereka tempati. Hal itu ditunjukkan pada bahasan variabel : 6,7,9,10,14,15,16,17, 26

b. Bentuk wadah usaha PKL

Bentuk dan dimensi wadah usaha PKL yang menunjukkan indikator tidak lagi sekedarnya, tetapi telah semakin berpotensi untuk membebani ruang jalan/ruang kota terungkap dalam bahasan variabel : 16,26,27

4. Imanensi dari krisis ekonomi ke krisis lingkungan binaan perkotaan

Bertambahnya dan bergesernya krisis secara horisontal dari krisis ekonomi hingga krisis lingkungan binaan di perkotaan, memerlukan antisipasi yang tidak pernah putus, karena tidak tertutup kemungkinan lingkaran krisis itu merupakan garis iterasi yang tidak pernah berhenti.

a. Keluar dari krisis ekonomi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas lingkungan binaan

Usaha PKL sebagai wadah keluar dari krisis ekonomi telah diyakini, namun harapan akan terwujudnya peningkatan taraf kehidupan disegala bidang masih menjadi pertanyaan, karena keluar dari krisis ekonomi saja tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas lingkungan binaan. Hal itu terungkap dalam bahasan variabel: 14,17,24 dan korelasi variabel : 2-24, 3&4 – 5,

b. Antisipasi krisis lingkungan binaan perkotaan di masa depan

Pemahaman tentang tipomorfologi dan karakteristik ruang jalan atau ruang kota yang ditempati PKL, posisi penempatannya yang lazim dilakukan oleh PKL, dan bentuk serta dimensinya beserta jenis dagangannya, ditunjukkan dalam bahasan variabel: 18, 19, 24. Pemahaman tersebut dapat berguna bagi antisipasi krisis lingkungan binaan di masa depan, dan berguna bagi usaha

pembenahan kondisi lingkungan binaan perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan PKL.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa hasil pengujian hipotesa adalah “tidak ditolak” atau telah *confirmed*. Semua variabel mendukung, dan tidak melemahkan hipotesa bahwa okupasi *vacant land* di kota oleh masyarakat marjinal yang pada awalnya sebagai usaha untuk *survive* cenderung menjadi *power* yang semakin sulit dibenahi dimasa datang.

Saran untuk pembenahan :

1. Sebelum dilakukan usaha pembenahan, perlu dicermati tentang perubahan paradigma tentang PKL. Selain itu perlu dicermati pula konsep tentang masyarakat marjinal yang berkaitan dengan usaha PKL yang dalam hal ini memerlukan redefinisi.
2. Sudah menjadi fakta bahwa PKL adalah sesuatu yang sangat fenomenal, terutama akhir-akhir ini. Hendaknya harus ada pengaturan formal, mengingat karena usaha PKL sifatnya sudah menjadi bidang pekerjaan walaupun selama ini diberi label informal, dan mengingat usaha PKL menempati bagian kota yang secara visual mencolok mata dan secara spatial berada pada tempat yang strategis dan bernilai lahan tinggi.
3. Perlu mendudukan secara benar fungsi ruang jalan, apakah hanya sebagai ruang publik dimana hak publik sepenuhnya adalah sesuai dengan peruntukan sebuah ruang jalan atau bagian ruang kota lain yang berfungsi sebagaimana peruntukannya, atau ditetapkan saja sebagai ruang kota yang berfungsi ganda. Dengan demikian perlu dicermati kembali konsep keadilan keseimbangan antara kepentingan publik (umum) dengan kepentingan privat (individu) dalam hal haknya masing-masing terhadap ruang publik kota.
4. Pembenahan fisik (apalagi bila hanya dari sisi penataan arsitektural semata) tidak

akan berjalan bila pembenahan pada aspek lain tidak sejalan. Untuk itu diperlukan selain masukan bersifat fisik-arsitektural, juga aturan main yang jelas berupa peraturan pengelolaan dan pemanfaatan ruang jalan secara benar dan adil bagi semua pihak.

Daftar Referensi

- , 1980, **Pedagang Kaki Lima**, Bahan Seminar Fakultas Teknik Unpar, Menggali Potensi Pedagang Kaki Lima sebagai Unsur Pembangun dalam Pengembangan Bandung Kota Indah, Bandung, 18-19 April 1980, Universitas Katolik Parahyangan.
- , 1981, **Pola Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah DKI Jakarta**, Laporan Penelitian no. 51-3-81, Kerjasama Koordinasi Penanaman Modal Daerah DKI Jakarta dan Pusat Penelitian Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Pajajaran, Bandung Maret 1981.
- , 1988, **Pedagang Kaki Lima in Jakarta**, Informal Sector, Draft Report, Revision April 14, 1988, Center for Policy and Implementation Studies.
- , 1992, **General Extention for Streetfood Producers and Vendors** : Report of pilot programme tried out in Bogor, West Java, BPPT-DGIS, TNO-IPB-VU, March 1992.
- , 1994/1995, **Pembinaan Kelembagaan Kelompok Pedagang Kaki Lima**, Pemerintah Daerah khusus Ibukota Jakarta Badan Koordinasi Pembinaan Sektor Informal/Golongan Usaha skala kecil, Laporan ketiga (final report), tahun anggaran 1994/1995, Kelompok Studi Masalah Perkotaan Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI)
- Carunia Mulya Firdausy, 1995, **Pengembangan Sektor Informal PKL di Perkotaan**, Dewan Riset Nasional dan Bappenas bekerja sama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan,

Ruang kota atau bagian ruang jalan tersebut, tampaknya sudah sangat menjadi kelaziman bagi PKL, digunakan sebagai tempat berdagang/berusaha. Tidak itu saja, bahkan bagian dari taman kota pun, serta beranda pertokoan tidak luput dari kegiatan “penguasaan ruang kota” oleh PKL. Di pusat kota, badan jalan penuh dengan PKL, sehingga jalur kendaraan hanya cukup untuk satu jalur saja. Trotoir sudah berubah menjadi bagian dari labirin pula, sehingga pejalan kaki yang melintasinya harus siap untuk berjalan miring.

Keadaan tersebut, bila dilihat dari sudut pandang kenyamanan publik dalam beraktivitas di kota, tentu saja dapat dikatakan kurang baik, karena kenyamanan aktivitas publik di kota paling dasar dan paling besar jumlahnya untuk pergerakan (mobilitas) adalah berjalan kaki. Walaupun perimbangan kepentingan publik (umum) dan kepentingan privat (individu) tersebut harus dikaji lebih jauh; terutama mengingat persepsi yang berbeda dari berbagai pihak tentang perimbangan kepentingan tersebut.

2. Posisi penempatan wadah berusaha

Posisi berdagang merupakan kajian yang melengkapi kajian tentang ruang jalan/ruang kota yang digunakan atau ditempati oleh PKL. Inipun sangat beragam. Sebanyak 143 PKL menempati ruang kota bersifat *free standing*. Disusul kemudian pada urutan kedua adalah PKL yang memanfaatkan pagar/dinding –yang biasanya berada di belakangnya, untuk ditempel dengan tempat usaha/dagangnya, yaitu sebanyak 24,8 %. PKL yang mendudukkan wadah usahanya diatas selokan, biasanya dengan menutup bagian atas selokan tersebut dengan hamparan kayu, bambu, besi atau kombinasi bahan tersebut sebanyak 20 PKL atau sebanyak 4,9 %. PKL yang sekaligus menutupi selokan dan juga menempel pada pagar/dinding di belakangnya adalah sejumlah 19,7 %. Selebihnya para

SKRIPSI

Marcellina Maureen Mardiani, 2000, **Karakterisasi PKL sebagai sistem Pengisi Ruang Kota, Studi Kasus : Dalem Kaum, Terminal Kebon Kelapa, Pasar baru Bandung**, Skripsi 09 Fakultas Teknik Program studi Teknik Arsitektur, Unpar, Bandung, Desember 2000.

MEDIA CETAK

Kumpulan Artikel PKL di Harian Media Cetak dan Online **Kompas** tahun 1996-2001

Kumpulan Artikel PKL di Harian Media Cetak dan Online **Pikiran Rakyat** tahun 1997-2001

Kumpulan Artikel PKL di Harian Media Cetak dan Online **Suara Pembaruan** tahun 1997-2001

PERATURAN & PERUNDANGAN

Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung No : tahun 1988, **Tentang Pengaturan Pengendalian Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Bandung.**

Peraturan Daerah nomor 06 tahun 1995 tentang **Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di wilayah Kotamadya daerah tingkat II Bandung.**

Peraturan Daerah nomor 08 tahun 1996 tentang **Tanda Daftar Kegiatan Usaha di Kotamadya Daerah tingkat II Bandung**

LAIN-LAIN

Marc Le Moulllec, 1998, Bandung, **Atlas Jalan & Indeks**, PT Jambatan.